

Lingkaran Setan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya dan Gagasan Manajemen Zakat Produktif sebagai Solusi

Junjun Arip Nugraha, SE., MM¹.

Syari'ah STAI Tasikmalaya,

Email :admin@economix.id dan economix@live.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam kemiskinan di Kota Tasikmalaya dengan menggunakan teori lingkaran setan kemiskinan Nurkse. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah dekriptif-eksplanatif. Manajemen zakat produktif dapat dijadikan solusi dalam penanggulangan kemiskinan melalui mekanisme *cooperative farming* dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui zakat dan instrumen filantropi Islam lainnya yaitu infaq, sedekah, dan wakaf. Dana yang terkumpul di amil zakat disalurkan kepada *mustahik* melalui skema *Qardhul Hasan*.

Kata Kunci : kemiskinan, manajemen zakat

Abstract

This study aims to analyze in depth poverty in the City of Tasikmalaya by using the Nurkse poverty circle vicious theory. The methodology used in this study is qualitative research. The analytical method used is descriptive-explanatory. Productive zakat management can be used as a solution in poverty alleviation through cooperative farming mechanisms by involving community participation through zakat and other Islamic philanthropic instruments, namely infaq, alms and endowments. The funds collected in amil zakat are distributed to mustahik through the Qardhul Hasan scheme.

Keywords : poverty, zakat management

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan kondisi sosial yang terjadi disemua negara dunia tidak terkecuali dinegara maju sekalipun, dalam kadar yang lebih rendah dibanding negara berkembang, termasuk Indonesia. Islam sebagai agama yang komprehensif, yaitu agama yang ajarannya lengkap sebagai tuntunan yang benar untuk segala jenis aktivitas kehidupan,

¹Dosen Tetap Prodi Ekonomi Syariah STAI Tasikmalaya

berdimensi akhirat, dalam kerangka keimanan kepada Allah SWT telah dengan jelas mendefinisikan kemiskinan, yang salah satu bagian sedikitnya terdapat pada Al-Qur'an Surat al-Kahfi ayat 79 yaitu:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ
كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya : *“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusak bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.”* (QS. al-Kahfi: 79)

Kata *miskîn* dalam ayat tersebut yang secara bahasa diartikan ‘diam’, maka secara istilah dapat diartikan orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kemiskinannya itu disebabkan oleh sikap diamnya. Orang tersebut bisa memperoleh sesuatu karena tidak bergerak tidak ada kemauan ataupun kesempatan untuk bergerak. (Ilmi, 2017). Lebih lanjut Ilmi (2017) menjelaskan bahwa manusia memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak terkecuali kuasa atas dirinya keluar dari kemiskinan dan melakukan perubahan sosial, dengan merujuk pada salah satu ayat Al-Qur'an yaitu QS. Al-Ra'd ayat 11 yaitu:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى
يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”* (QS. al-Ra'd:11)

Kemiskinan menjadi isu global sehingga pada tahun 2000 menjadi agenda utama dalam *Millenium Development Goals (MDGS)* yang terdiri dari 8 tujuan, 18 target, dan 67 indikator . Kemiskinan menjadi salah satu tujuan *MDGs* yang belum selesai sampai berakhirnya agenda tersebut pada September 2015.Selanjutnya pada rangkaian agenda *United Nations General Assembly (UN-GA)* ke-70, pada 25 September 2015 pemimpin dunia menyepakati tujuan pembangunan global yang baru dengan nama “*Sustainable Development Goals*” (*SDGs*) yang berisikan 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Kemiskinan diposisikan pada tujuan pertama yaitu pada tahun 2030, pengentasan kemiskinan ekstrim bagi semua orang dimanapun dan dalam bentuk apapun. Ukuran seseorang dikatakan miskin saat ini adalah apabila pendapatannya kurang dari \$1.25 per hari.

Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar dalam pengukuran kemiskinan. Ketidakkampuan ekonomi penduduk menjadi cara pandang BPS yaitu dari pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan konsep ini maka penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan sejak pemerintah pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten dan kota. Hal ini terlihat jelas komitmennya dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor5 Tahun 2018tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. Berbagai program peningkatan kesejahteraan telah diluncurkan pemerintah antara lain Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Program Beras Miskin yang kemudian berubah istilah menjadi Program Beras Sejahtera.

Namun demikian, upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Peran serta masyarakat dan perusahaan akan sangat berarti dalam andil penanggulangan kemiskinan. Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam akan sangat berpotensi dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini tiada lain karena Islam mempunyai instrumen filantropi atau kedermawanan yang bersifat wajib yaitu zakat dalam rukun Islam. Selain itu instrument infaq, sedekah dan wakaf akan menambah daya dermawan umat Islam Indonesia. Dana atau harta lain yang terkumpul dari instrument filantropi tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal untuk membantu *mustahiq* atau penerima zakat yang salah satunya adalah kaum miskin. Dana atau harta zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) ini dapat disalurkan secara konsumtif dan produktif. Keduanya dibutuhkan tergantung situasi sosial yang dihadapi.

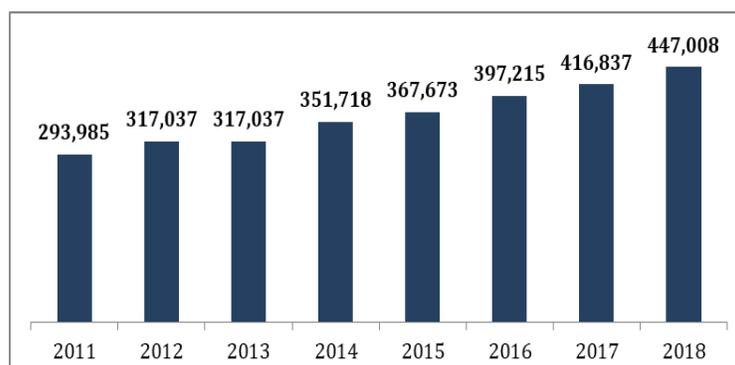
Dalam beberapa tahun terakhir Kota Tasikmalaya dihadapkan pada persoalan kemiskinan dimana Kota Tasikmalaya menempati urutan ke 27 atau kota dengan persentase penduduk miskin atau angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Setiap tahun persentase penduduk miskin memang terus menurun, akan tetapi kecepatannya masih tergolong lamban disbanding kabupaten atau kota lain di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam kemiskinan di Kota Tasikmalaya dengan pendekatan deskriptif dan eksplanatif dengan menggunakan teori lingkaran setan kemiskinan Nurkse, hingga dapat diketahui dititik mana sebenarnya kemiskinan itu berawal. Selanjutnya, apabila sudah ditemukan awal pangkalnya, maka akan dilakukan pemodelan manajemen zakat produktif sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan seluruh pihak.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah dekriptif-eksplanatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder publikasi Badan Pusat Statistik dan dokumen hukum kebijakan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Deskripsi Kemiskinan di Kota Tasikmalaya****1. Garis Kemiskinan (*Poverty Line*)**

Garis kemiskinan di Kota Tasikmalaya seiring meningkatnya harga-harga secara umum mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2011-2018 dari Rp293.985,00 pada tahun 2011 menjadi Rp447,008,00 /kapita/bulan pada tahun 2018.



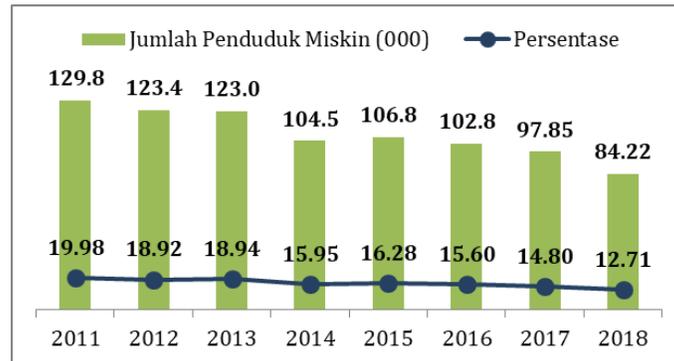
Sumber : BPS Pusat (tahun 2011-2018)

Gambar 1.

**Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2018**

2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan atau dengan istilah lain angka kemiskinan merupakan jumlah dan persentase penduduk miskin terhadap total penduduk suatu wilayah secara keseluruhan. Trend tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya cenderung mengalami penurunan yang dapat diartikan sebagian penduduk miskin telah berhasil keluar dari garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kota Tasikmalaya pada tahun 2018 sebanyak 84.220 jiwa atau 12.71%, terendah dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir. Namun demikian, sama halnya seperti tahun-tahun sebelumnya, tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih yang tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lain di Provinsi Jawa Barat.



Sumber : BPS Pusat (tahun 2011-2018)

Gambar 2.

Jumlah (000) dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2018

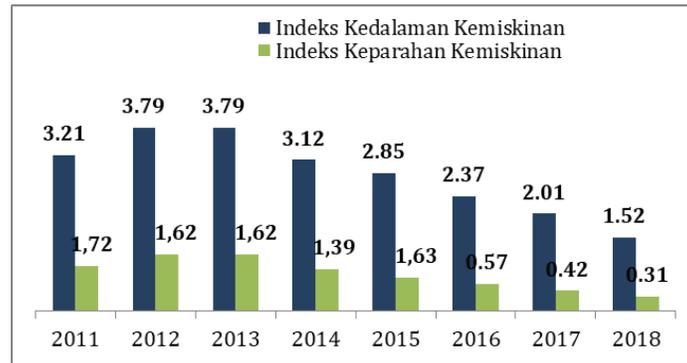
Pembangunan Basis Data Terpadu (BDT) didasarkan atas hasil PPLS 2011-BPS. PPLS 2011 mendata sekitar 40% rumah tangga di seluruh Indonesia yang paling rendah status sosial ekonominya, yang awalnya diidentifikasi melalui *poverty map*. Data rumah tangga BDT diranking menurut peringkat kesejahteraannya dengan metode Proxy-Means Testing. PMT digunakan untuk memperkirakan kondisi sosial-ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga meliputi kependudukan, status sosial, kepemilikan asset dan lain sebagainya. Saat BDT dikembangkan, Cakupan 40% saat BDT dikembangkan dinilai memenuhi syarat cukup untuk memenuhi kebutuhan *targeting* program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Cakupan 40% ini meliputi penduduk miskin (*chronic poverty*) dan rentan miskin (*transient poverty*). Konsentrasi kemiskinan berdasarkan kecamatan di Kota Tasikmalaya disajikan dalam tabel dibawah. Data terpilah seperti ini sangat bermanfaat dalam program penanggulangan kemiskinan karena akan sangat berpengaruh dalam penentuan kebijakan dan prioritas program berdasarkan karakteristik spasial.

Tabel 1.
Perubahan Data Tahun 2015 Desil 1-4
dengan BDT 2018 Persentil 1-40

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga									
	Desil 1		Desil 2		Desil 3		Desil 4		Total	
	2015	2018	2015	2018	2015	2018	2015	2018	2015	2018
Kawalu	6.39	6371	3.085	3070	362	361	370	369	10.21	10.17
Tamansari	6.571	6547	2.754	2748	311	309	303	302	9.939	9.906
Cibeureum	3.832	3785	2.429	2420	270	269	338	331	6.869	6.805
Purbaratu	3.261	3233	2.063	1957	265	265	254	251	5.843	5.706
Tawang	1.361	1343	1.44	1435	276	275	276	275	3.353	3.328
Cihideung	2.235	2197	1.774	1762	283	280	313	310	4.605	4.549
Mangkubumi	5.524	5490	3.458	3419	453	447	446	440	9.881	9.796
Indihiang	2.243	2234	2.128	2127	391	392	408	408	5.17	5.161
Bungursari	2.499	2486	1.532	1531	202	202	193	193	4.426	4.412
Cipedes	3.355	3303	2.334	2329	359	359	402	402	6.45	6.393
Total	37.27	36.99	23	22.8	3.17	3.16	3.3	3.28	66.74	66.23

3. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Dimensi lain yang sangat penting diperhatikan selain jumlah dan tingkat kemiskinan adalah yaitu tingkat kedalaman (*Poverty Gap Index-P1*) dan keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*). P1 adalah rata-rata *gap* pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap *poverty line*. Semakin tinggi P1, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari *poverty line*. P2 menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi P2, semakin tinggi kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin. P1 dan P2 di Kota Tasikmalaya dalam kurun 8 tahun terakhir mengalami penurunan dan pada tahun 2018 mencapai titik terendahnya masing-masing sebesar 2.01 dan 0.31. Berbeda dengan ranking persentase penduduk miskin Kota Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat, P1 Kota Tasikmalaya pada tahun 2018 menempati ranking ke 21, dan P2 menempati ranking ke 19 dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.



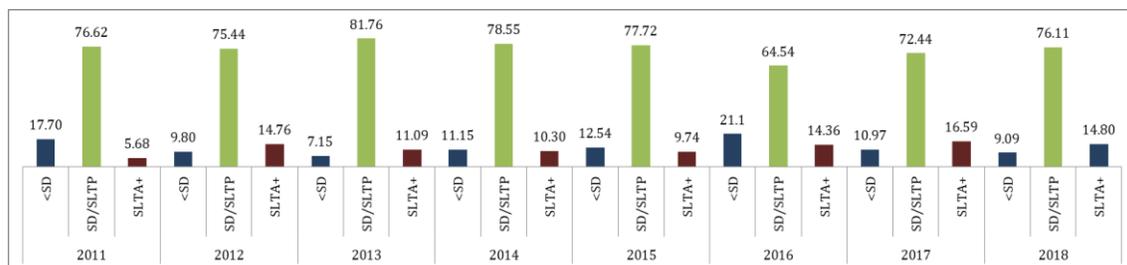
Sumber : BPS Pusat (tahun 2011-2018)

Gambar 3.

**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P1)
Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2018**

4. Kemiskinan Pendidikan

Pendidikan yang ditamatkan dalam pemaparan ini adalah persentase seluruh kepala rumah tangga berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah atau surat tanda tamat belajar tertinggi yang dimiliki. Secara umum dalam kurun tahun 2011-2018 mayoritas hanya berpendidikan SMP. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam kurun 8 (delapan) tahun terakhir, capaian pendidikan yang ditamatkan mayoritas pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), dengan persentase yang signifikan dibanding capaian pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi (SLTA+).



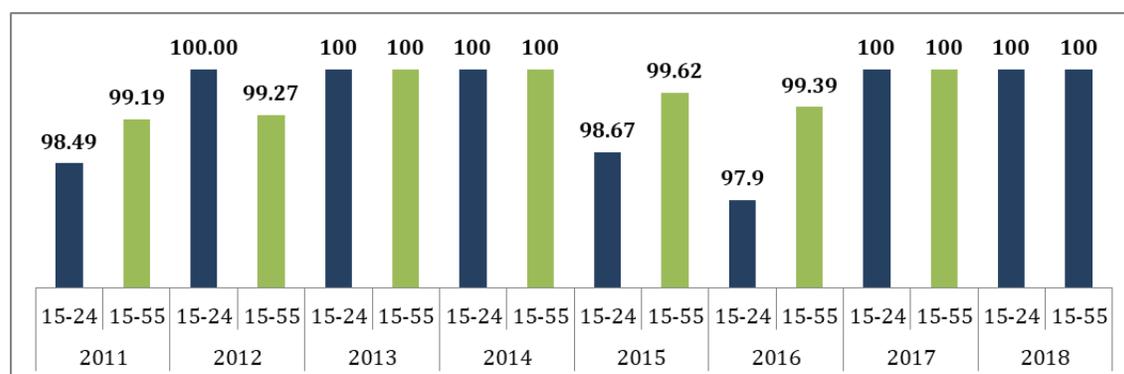
Sumber : BPS Pusat (tahun 2011-2018)

Gambar 4.

**Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2018**

Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD di Kota Tasikmalaya menempati ranking ke 23 dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini lebih baik dari kebanyakan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dan lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Barat. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tamat SD/SLTP pada tahun 2018 sebesar 76.11% meningkat dibanding tahun 2017 yang sebesar 72.44%. Kota Tasikmalaya menempati urutan ke 6 dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini lebih baik dari kebanyakan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dan lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Jawa Barat. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tamat SLTA+ pada tahun 2018 sebesar 14.80% menurun dibanding tahun 2017 yang sebesar 16.59%. Kota Tasikmalaya menempati urutan ke 12 dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Meskipun menurun, kondisi ini lebih baik dari hampir setengah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dan lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Angka Melek Huruf (AMH) yang merupakan kebalikan dari buta huruf adalah proporsi seluruh penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kata-kata atau kalimat sederhana dalam huruf latin, arab, atau lainnya. Secara umum dalam kurun waktu 2011-2018, AMH penduduk miskin sudah sempurna 100% sempurna pada tahun 2017 dan 2018 dan harus dipertahankan.

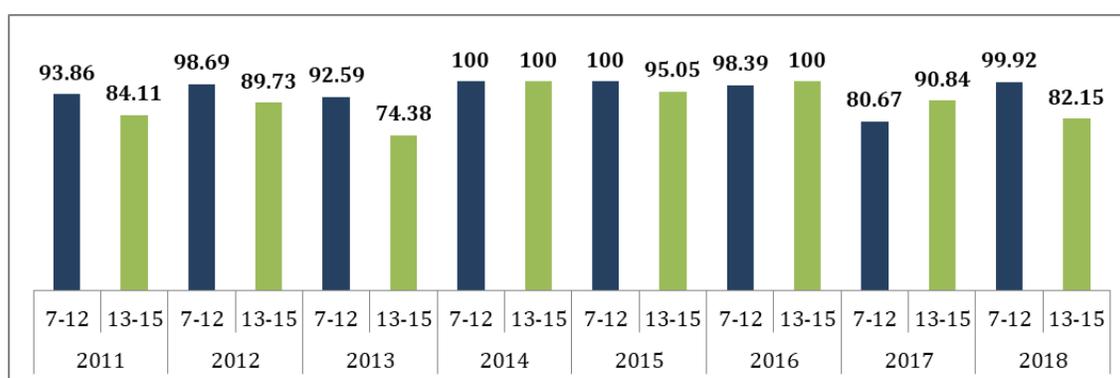


Sumber : BPS Pusat (tahun 2011-2018)

Gambar 5.

Angka Melek Huruf (%) Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2018

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah persentase dari seluruh penduduk miskin menurut berbagai kelompok umur tertentu yang masih bersekolah. Kota Tasikmalaya telah sukses mengerek APS umur 7-12 tahun yang terlihat dari capaian tahun 2014 sebesar 100%, selanjutnya mengalami fluktuasi dengan capaian terendah di tahun 2017 sebesar 80.67%. dan kembali meningkat sebesar 99.92% pada tahun 2018. Disisi lain kelompok umur 13-15 tahun mengalami penurunan dari 90.84% pada tahun 2017 menjadi 82.15% pada tahun 2018.



Sumber : BPS Pusat (tahun 2011-2018)

Gambar 6.

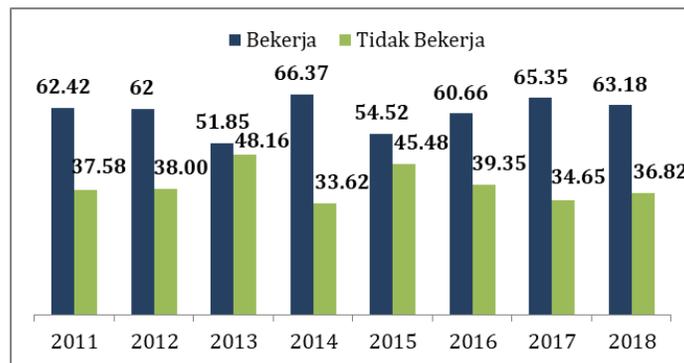
Angka Partisipasi Sekolah (%) Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2018

APS penduduk miskin umur 7-12 tahun pada tahun 2018 menempati ranking ke 16 dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini lebih baik dibanding 11 kabupaten dan kota lain di Provinsi Jawa Barat dan lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Jawa Barat. APS penduduk miskin umur 13-15 tahun pada tahun 2018 sebesar 82.15% menurun dibanding tahun 2017 yang sebesar 90.84%. Kota Tasikmalaya menempati ranking ke 21 dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.

5. Kemiskinan Ketenagakerjaan

Selain informasi tentang kemiskinan makro, dalam uraian ini juga disajikan profil kemiskinan menurut status dan sektor pekerjaan (pertanian dan bukan pertanian), dan

pengelompokan pekerja berdasarkan status pekerjaan (pekerja formal dan informal). Kategori tidak bekerja diartikan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir. Secara umum persentase penduduk miskin yang tidak bekerja dan bekerja mengalami fluktuasi. Sayangnya setelah mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai dengan 2017, capaian indikator ini kembali meningkat menjadi 36.82% pada tahun 2018. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun keatas di Kota Tasikmalaya yang tidak bekerja pada tahun 2018 sebesar 36.82% menempati urutan pertama terendah dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dan jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini merupakan capaian terbaik dari berbagai indikator lainnya dan dapat dijadikan penentu bagi Kota Tasikmalaya untuk keluar dari kemiskinan, karena pekerjaan berhubungan erat dengan pendapatan dan daya beli penduduk miskin sebagai ukuran utama kemampuan pemenuhan kebutuhan.

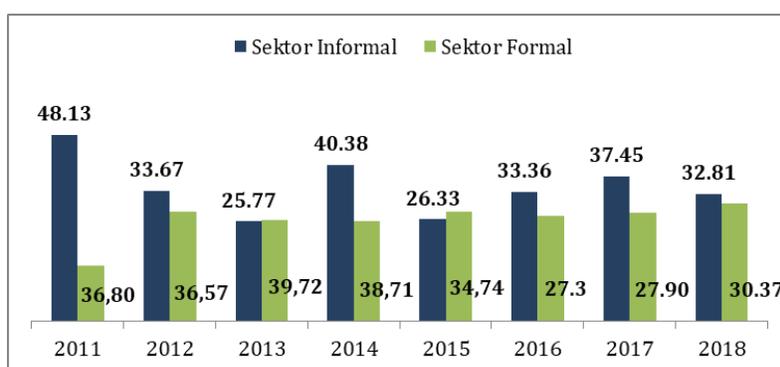


Sumber : BPS Pusat (tahun 2011-2018)

Gambar 7.
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja dan Tidak Bekerja Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2018

Bekerja di sektor informal adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai status pekerjaan utama berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak diberi upah, pekerja bebas, atau pekerja keluarga yang tidak diberi upah.

Sedangkan bekerja di sektor formal adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai status dalam pekerjaan utama berusaha dibantu buruh tetap atau buruh diberi upah. Fluktuasi bekerja di sektor informal dan formal tampak mengalami fluktuasi dengan kecenderungan substitusi, yaitu ketika persentase meningkat di sektor formal maka terjadi penurunan di sektor informal. Tingkat *turn over* ini penting untuk diperhatikan terutama dalam hal mempertahankan eksistensi sektor usaha formal agar stabil karena berkorelasi dengan fluktuasi “kualitas” pekerjaan penduduk miskin. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun keatas di Kota Tasikmalaya yang bekerja di sektor informal menempati urutan ke 16 dari 27 kabupaten dan kota dan sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun keatas di Kota Tasikmalaya yang bekerja di sektor formal menempati urutan ke 3 dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dan jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat.



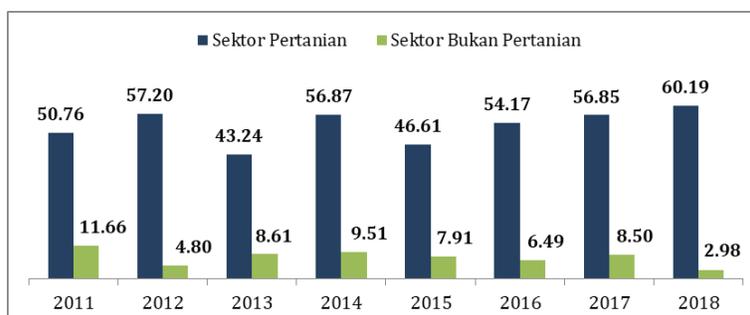
Sumber : BPS Pusat (tahun 2011-2018)

Gambar 8.

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal dan Informal Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2018

Bekerja di sektor pertanian adalah persentase penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian yang meliputi tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan sub sektor pertanian lain. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun keatas yang bekerja di sektor bukan pertanian menempati

urutan ke 25 dari 27 kabupaten dan kota dan lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun keatas di Kota Tasikmalaya yang bekerja di sektor pertanian menempati urutan ke 27 dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat.

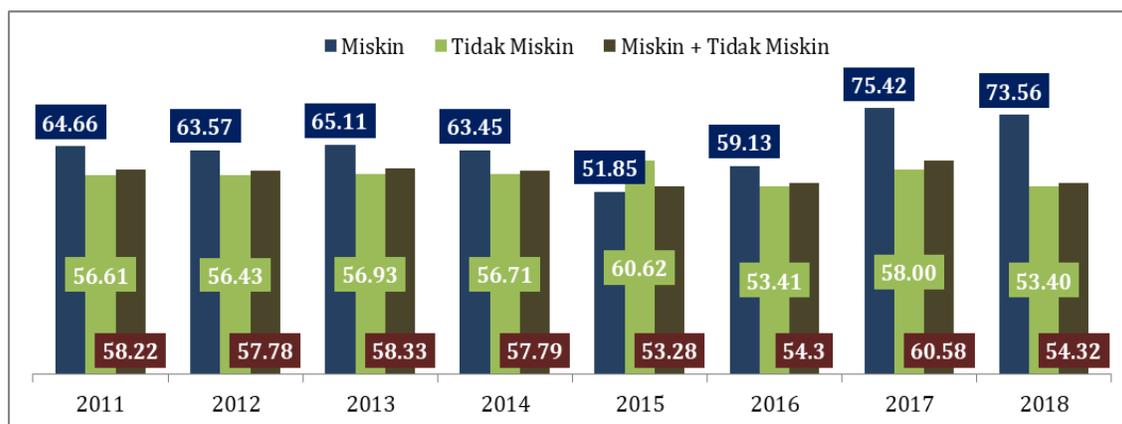


Sumber : BPS Pusat (tahun 2011-2018)

Gambar 9.
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Pertanian dan Bukan Pertanian Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2018

6. Kemiskinan Daya Beli (Pengeluaran per Kapita)

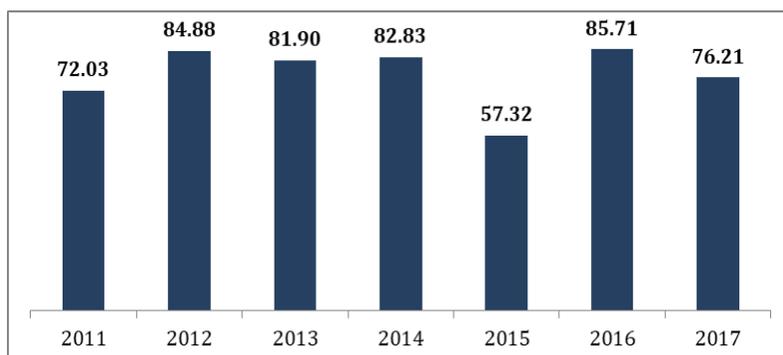
Ukuran kualitas hidup manusia mengandung tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak (kondisi ekonomi). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Kesejahteraan masyarakat dinilai mengalami peningkatan apabila peningkatan konsumsi riil perkapita lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Capaian pengeluaran perkapita untuk makanan penduduk miskin di Kota Tasikmalaya pada tahun 2017 sebesar 75.42% turun menjadi 73.56% pada tahun 2018. Persentase pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kota Tasikmalaya menempati urutan ke 7 dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat.



Sumber : BPS Pusat (tahun 2011-2018)

Gambar 10.**Persentase Pengeluaran per Kapita untuk Makanan Menurut Status Miskin Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2018****7. Kemiskinan Kesehatan**

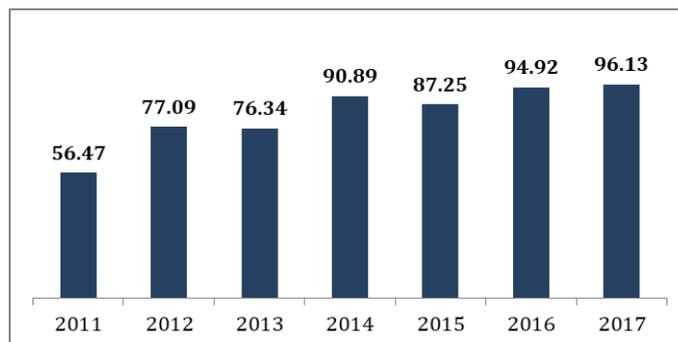
Perempuan pengguna alat keluarga berencana (KB) adalah persentase perempuan rumah tangga miskin berumur 10 tahun ke atas yang berstatus kawin, cerai hidup, atau cerai mati dan pernah atau sedang menggunakan alat atau cara KB. Kondom wanita. Statistik perempuan pengguna KB hanya tersedia sampai tahun 2017 sebesar 76.21% dimana terjadi penurunan signifikan dibanding tahun 2016 sebesar 85.71%. Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2017 mencapai 661.404 jiwa atau meningkat 0.27% dibanding tahun 2016 sebanyak 659.606 jiwa. Pada tahun 2018 penduduk Kota Tasikmalaya tumbuh 0.20% menjadi 662.723 jiwa. Apabila diasumsikan perempuan pengguna KB pada tahun 2018 meningkat maka hal ini berdampak positif dalam pengendalian jumlah penduduk.



Sumber : BPS Pusat (tahun 2011-2018)

Gambar 11.
Persentase Perempuan Pengguna Alat KB
Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2017

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengartikan imunisasi sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit menular yang merupakan prioritas Kementerian Kesehatan sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai *Sustainable Development Goals* yaitu penurunan angka kematian anak. Perubahan sajian statistik kemiskinan tentang imunisasi balita di rumah tangga miskin hanya terinci pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 hanya tersaji total ragam imunisasi yang meningkat dari 94.92% menjadi 96.13%. Statistik angka kematian balita rumah tangga miskin penting untuk dieksplorasi untuk mengetahui dampak pemberian imunisasi terhadap angka kematian anak pada rumah tangga miskin.



Sumber : BPS Pusat (tahun 2011-2017, diolah)

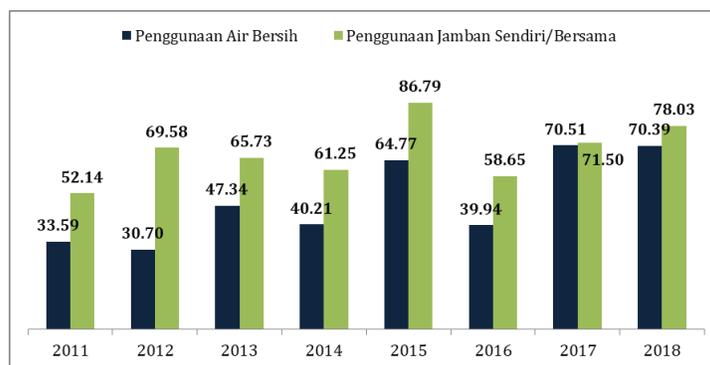
Gambar 12.

Persentase Balita di Rumah Tangga Miskin yang telah Diimunisasi Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2017

8. Kemiskinan Air Bersih dan Penggunaan Jamban

BPS mendefinisikan rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang menggunakan air minum kemasan bermerek, air minum *refill*, air produk perusahaan daerah air minum, sumur bor atau pompa, sumur atau mata air terlindung dengan jarak ke penampungan limbah, kotoran, dan tinja lebih dari atau sama dengan 10 meter. Rumah tangga pengguna jamban sendiri atau bersama adalah rumah tangga yang menggunakan tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga itu sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu di suatu tempat seperti MCK. Persentase rumah tangga miskin pengguna air bersih di Kota Tasikmalaya pada tahun 2018 sedikit menurun dibanding tahun 2017. Namun demikian penggunaan jamban sendiri atau bersama mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 6.53% dimana pada tahun 2017 hanya 71.50% sedangkan pada 2018 mencapai 78.03. Secara umum kesuksesan capaian penggunaan jamban sendiri atau bersama pada tahun 2015 yang mencapai 86.79% penting dijadikan perhatian untuk kembali diraih setelah anjlok pada tahun 2016 sampai 58.65%. Sejak tahun 2016 memang terus mengalami peningkatan sampai 2018 dan kedepan sangat besar peluang untuk melampaui capaian tahun 2015. Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air bersih di Kota Tasikmalaya menempati urutan ke 11 dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dan

lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat. Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama di Kota Tasikmalaya menempati urutan ke 15 dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat.



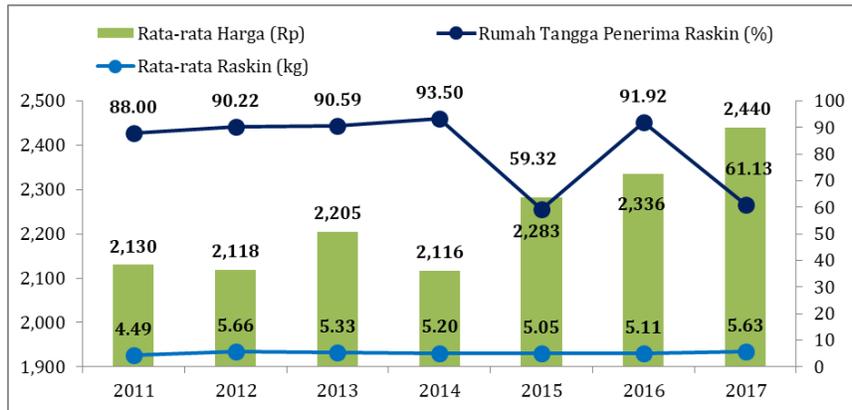
Sumber : BPS Pusat (tahun 2011-2018)

Gambar 13.

Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih dan Jamban Sendiri/Bersama di Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2018

9. Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan

Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah atau dikenal dengan program beras miskin yang kemudian berubah menjadi beras sejahtera adalah program nasional lintas sektoral, untuk membantu mencukupi kebutuhan beras. Rumah tangga yang berada pada quantile 1 merupakan rumah tangga yang berada pada kelompok 20% penduduk dengan pengeluaran terendah. Statistik untuk indikator ini hanya tersedia sampai tahun 2015, sehingga tidak cukup data untuk menggambarkan kondisi aktual saat ini.



Sumber : BPS Pusat (tahun 2011-2017)

Gambar 14.
Rata-rata Harga Beras Raskin yang Dibeli Rumah Tangga Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2015

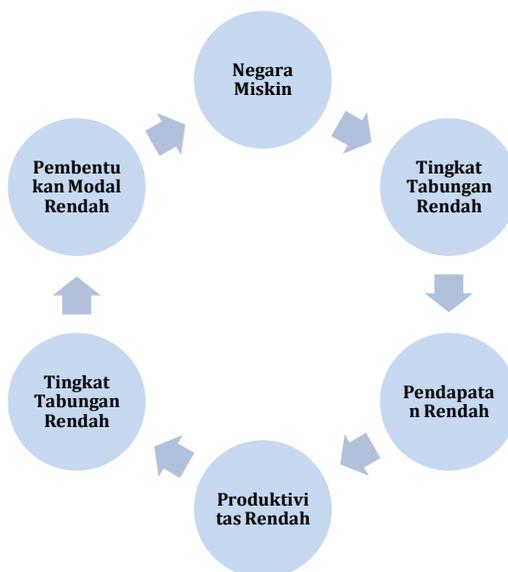
B. Eksplanasi Kemiskinan di Kota Tasikmalaya

Eksplanasi akan dimulai dengan pendekatan teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Sharp, et al (1996) dalam Kuncoro (1997) sebagaimana dikutip Djannata dan Amanti (2012) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi yaitu:

- a. Dalam tataran mikro kemiskinan timbul karena ketidakmerataan pada pemilikan sumber daya khususnya pada penduduk miskin yang menyebabkan ketimpangan pendapatan antar penduduk.
- b. Penduduk miskin yang identik dengan kualitas sumber daya manusia rendah, menyebabkan produktivitas yang rendah sehingga tak pelak menyebabkan pendapatan rendah, misalkan rendahnya upah pekerja miskin. Kualifikasi pendidikan, ketidakberuntungan, diskriminasi, dan faktor keturunan menjadi penyebab utama rendahnya kualitas sumber daya manusia penduduk miskin.
- c. Perbedaan dalam mengakses permodalan.

Pemikiran Sharp tersebut diataslah yang kemudian melahirkan teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) oleh Nurkse (1953) dalam Kuncoro (1997) sebagaimana dikutip Djannata dan Amanti (2012), yang kemudian mengatakan: *"a poor country is poor"*

because it is poor". Keterkaitan antar indikator dalam hubungan kausalitas dalam lingkaran setan kemiskinan Nurkse tersebut digambarkan sebagai berikut.



Sumber : Nurkse (1953) dalam Rizal (2004) dari Damanhuri (2010)

Gambar 15.

Lingkaran Setan Kemiskinan

Selanjutnya analisis akan dirunut dan dimulai dengan melihat indikator pembangunan ekonomi yang paling mewakili kinerja pembangunan ekonomi sekaligus berdampak simultan terhadap kinerja pembangunan sosial yaitu Produk Domestik Regional Brutto.

Tabel 2.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016–2018

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.56	5.24	5.03
B	Pertambangan dan Penggalian	0.01	0.01	0.01
C	Industri Pengolahan	14.09	13.78	13.73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.01	0.01	0.01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.36	0.37	0.38
F	Konstruksi	15.54	15.90	16.44

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017*	2018**
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22.80	22.65	22.36
H	Transportasi dan Pergudangan	9.61	9.63	9.59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.67	4.84	5.02
J	Informasi dan Komunikasi	3.05	3.15	3.11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.96	10.95	10.78
L	Real Estat	1.52	1.55	1.58
M,N	Jasa Perusahaan	0.95	0.97	1.00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.72	4.51	4.45
P	Jasa Pendidikan	1.80	1.90	1.94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.97	2.03	2.06
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.38	2.51	2.50
Produk Domestik Regional Brutto		100	100	100

* Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

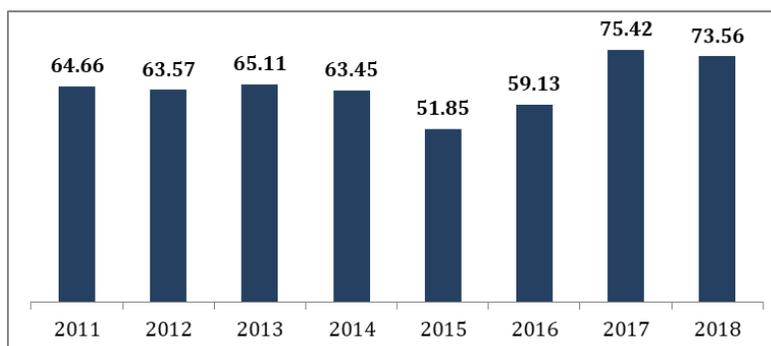
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya (tahun 2019)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 3 (tiga) kategori lapangan usaha dominan di Kota Tasikmalaya yaitu kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, dan Industri Pengolahan.

ILO oleh Nazara (2010) menjelaskan kegiatan informal merupakan fenomena dibanyak negara berkembang, yang identik dengan upah rendah, pekerjaan sulit, berbahaya, dan keamanan, perlindungan rendah, sehingga dalam konteks ekonomi wajar dikatakan sebagai sebuah pekerjaan yang tidak layak. Meskipun kondisi ini secara nyata menyebabkan rumah tangga tidak mendapatkan kehidupan layak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi informal merupakan sumber nafkah dan perlindungan segera bagi penduduk miskin. Persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor formal dan informal secara nyata berada disektor pertanian. Tingginya persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian yang pada tahun 2018 sebesar 60.19% merupakan angka tertinggi sejak tahun 2011 sangat berkebalikan dengan program pemerintah dan fakta struktur ekonomi Kota Tasikmalaya berdasarkan distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha diatas. Kondisi ini sangat jelas memperlihatkan bahwa penduduk miskin tidak dapat menikmati atau tidak mempunyai akses untuk bekerja di ketiga sektor dominan yang

notabene non pertanian. Kemudian bagaimana dampak kondisi ini terhadap angka kemiskinan?

Worldbank (2007) dalam Satrio (2018), menyatakan bahwa status pekerjaan disektor pertanian berkorelasi kuat dengan kemiskinan. Penyebabnya adalah rendahnya tingkat konsumsi penduduk yang bekerja disektor pertanian dibandingkan dengan penduduk yang bekerja disektor nonpertanian. Kondisi inilah menyebabkan risiko lebih besar untuk menjadi miskin. Satrio (2018) menemukan bahwa variabel pertanian hasil analisis regresi logit berarah positif yang menunjukkan bahwa kepala rumah tangga dengan pekerjaan di sektor pertanian meningkatkan risiko kemiskinan. Kepala rumah tangga dengan pekerjaan di sektor pertanian memiliki resiko peluang berstatus miskin 1,428 kali lebih tinggi daripada yang bekerja disektor selain pertanian, industri dan perdagangan. Inti temuan *Worldbank* (2007) dan Satrio (2018) ini jelas yaitu pekerja disektor pertanian mempunyai kecenderungan dan risiko besar menjadi miskin (tentu dengan catatan pertanian khas negara berkembang yaitu petani gurem), sehingga tak pelak menyebabkan pendapatan rendah yang berimplikasi pada porsi pengeluaran atau belanja rendah. Kebutuhan manusia dapat dikategorikan berdasarkan kebutuhan primer (pangan, sandang, papan), sekunder (pendidikan, hiburan), dan tersier (produk mewah). Ekonomi sebagai sebuah ilmu tentang pilihan alokasi sumberdaya yang terbatas, sangat logis diterapkan terhadap kebutuhan manusia secara berjenjang. Sesuai statistik BPS yang hanya menyajikan pengeluaran berdasarkan kategori makanan dan bukan makanan, maka analisis pun akan dibatasi pada kategori BPS tersebut.



Sumber : BPS Pusat (tahun 2011-2018)

Gambar 16.

Persentase Pengeluaran per Kapita untuk Makanan Penduduk Miskin Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2018

Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita sebulan berupa makanan senilai Rp562.543 dan non makanan senilai Rp481.111. Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kota Tasikmalaya sebesar 53,9% untuk komoditas makanan dan 46,1% untuk komoditas bukan makanan. Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita sebulan penduduk Kota Tasikmalaya pada golongan pengeluaran Rp200.000 hingga Rp1.499.999, lebih banyak pada kategori makanan. Sedangkan pada golongan pengeluaran lebih dari Rp1.500.000, pengeluaran konsumsi kategori bukan makanan menjadi lebih besar daripada makanan. Semakin meningkat standar kehidupan masyarakat, semakin banyak pengeluaran konsumsinya untuk bukan makanan. Capaian pengeluaran perkapita penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 75.42% anjlok menjadi 73.56% pada tahun 2018. Kondisi ini meskipun turun tetap mengkonfirmasi keterkaitan indikator ini dengan status bekerja penduduk miskin yaitu bekerja disektor pertanian yang kebanyakan sektor informal yang berkorelasi langsung dengan tingkat pendapatan yang akhirnya disebut daya beli. Apabila pada tahun 2018 penduduk miskin Kota Tasikmalaya membelanjakan pendapatannya sebesar 73.56% untuk makanan, pertanyaannya kemudian, apakah sisa pendapatan sebesar 26.44% cukup untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan?

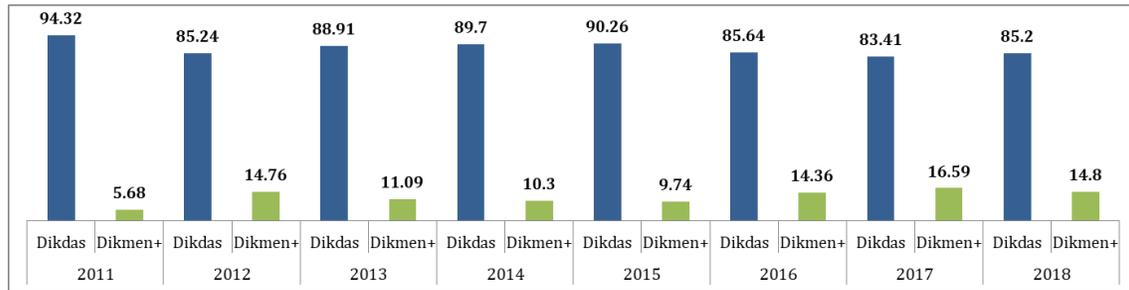
Status pekerjaan penduduk miskin, pendapatan penduduk miskin, dan pengeluaran per kapita penduduk miskin untuk makanan di Kota Tasikmalaya yang sangat tinggi pada

akhirnya merembet dan bermuara pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan bukan makanan lainnya. Tak pelak kondisi ini menjadi sebab simultan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Paparan selanjutnya pada kajian ini hanya menganalisa hubungan kemiskinan dan pendidikan anak-anak dikeluarga miskin sebagai contoh, karena keterbatasan data seperti akses penduduk miskin terhadap layanan kesehatan.

Penelitian Rizal (2006) menyimpulkan bahwa:

- a. Program Wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun atau pendidikan tingkat dasar tidak cukup berperan dalam penanggulangan kemiskinan.
- b. Semakin tinggi tingkat pendidikan sejak jenjang menengah sampai tinggi, semakin berperan dalam penanggulangan kemiskinan.

Menurut data BPS (2009), 90,65% KRT miskin yang bekerja adalah berpendidikan dasar ke bawah. Indikasi ini menunjukkan bahwa mereka yang tergolong miskin cenderung berpendidikan rendah. Lebih lanjut berdasarkan data BPS (2011), penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja lulusan SD dan SMP dengan rata-rata upah/gaji bersih pekerja/karyawan selama sebulan menurut pendidikan SD dan SMP berkisar antara Rp750.000–Rp1.120.000. Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia masih mengandalkan tenaga kerja murah. Rendahnya tingkat pendapatan pekerja berpotensi meningkatkan kemiskinan. Hal ini berarti bahwa kesempatan kerja bagi lulusan pendidikan dasar belum mampu untuk mengurangi kemiskinan, tetapi cenderung dapat menambah tingkat kemiskinan.



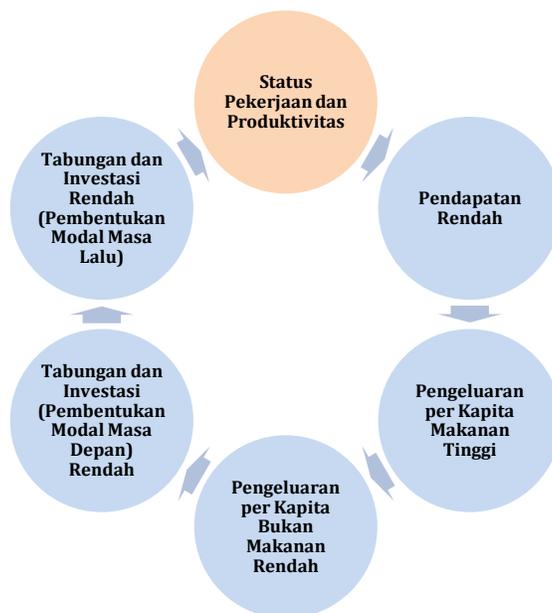
Sumber : BPS Pusat (tahun 2011-2018, diolah)

Gambar III.39.

**Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Pendidikan Dasar dan Menengah/Tinggi yang Ditamatkan
Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2018**

Kondisi persentase penduduk miskin usia 15 tahun keatas menurut pendidikan yang ditamatkan di Kota Tasikmalaya berdasarkan data pada gambar diatas menunjukkan penduduk miskin hanya mampu menikmati pendidikan pada tingkat dasar dengan persentase yang sangat tinggi. Berdasarkan fakta ini, teori, dan penelitian yang dikemukakan, maka sangat jelas bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya sangat dipengaruhi oleh rendahnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan menengah dan tinggi, karena pendapatan sangat dominan dialokasikan untuk kebutuhan makanan.

Berdasarkan analisis diatas dan sandingan dengan teori lingkaran setan kemiskinan Nurkse, maka dapat dibuat gambar alir lingkaran setan kemiskinan di Kota Tasikmalaya, dimana titik awalnya adalah status pekerjaan penduduk miskin yang 60.19% berada disektor pertanian dan sebagian besar berstatus informal.



Gambar 16.
Lingkaran Setan Kemiskinan Kota Tasikmalaya

C. Kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Penanggulangan Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyentuh akar masalah dalam kerangka ekplanasi sehingga dapat diketahui sejauhmana dampak program penanggulangan kemiskinan terhadap penurunan angka kemiskinan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh White dan Booth (2003) dalam Satrio (2018) bahwa apabila ingin menyelesaikan problem sumber kemiskinan maka dibutuhkan suatu eksplanasi paling mendasar sebagai strategi yang tepat dan benar yang mampu menjelaskan alasan seseorang jatuh miskin.

Analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya akan dimulai dengan menelaah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan hal yang sangat mendasar sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah adalah kesenjangan harapan atau ekspektasi antara capaian pembangunan existing dengan perencanaan masa lalu dan perencanaan masa depan dengan capaian pembangunan existing. Permasalahan pembangunan yang diangkat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 yang berkaitan erat dengan kemiskinan dan beberapa hal sesuai dengan uraian deskriptif diatas adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat sub aspek Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi meliputi rendahnya daya beli masyarakat dan PDRB per kapita, masih tingginya kontribusi bahan makanan terhadap laju inflasi, dan tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator rasio gini. Sub aspek kesejahteraan sosial meliputi tingginya angka kemiskinan, tingginya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1, tingginya pengangguran terbuka, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, masih ditemukannya kasus balita gizi buruk, belum optimalnya capaian indeks pembangunan manusia (IPM) dan capaian angka harapan hidup.
- b. Aspek Pelayanan Umum sub aspek Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - (1) Pendidikan meliputi ketimpangan sebaran dan kualitas sekolah, rasio kelas dan murid belum sesuai standar, rendahnya angka pendidikan yang ditamatkan, terdapat anak usia pendidikan dasar yang belum bersekolah, terbatasnya tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana dan prasarana pendidikan.
 - (2) Kesehatan meliputi belum optimalnya capaian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), meningkatnya penderita penyakit degenerative, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu antara lain spesialis dan sub spesialis tertentu, tingginya tingkat penyebaran penyakit menular diantaranya penyakit TB dan HIV AIDS, belum optimalnya jaminan kesehatan untuk rakyat miskin, pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya, dan

pelayanan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya sebagai rumah sakit rujukan regional di wilayah Priangan Timur.

- (3) Pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu belum optimalnya kualitas jaringan irigasi terutama pada daerah yang menuju lahan pertanian teknis.
 - (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi luasnya kawasan pemukiman kumuh, banyaknya jumlah rumah tidak layak huni, belum optimalnya capaian rumah tangga yang dapat mengakses air minum, dan memiliki akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik, dan adanya permasalahan selisih kebutuhan dan ketersediaan (*backlog*) perumahan.
 - (5) Sosial meliputi belum optimalnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terbatasnya sarana dan prasarana penanganan PMKS, aksesibilitas sarana publik yang ramah untuk difabel dan lanjut usia dan lemahnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- c. Aspek Pelayanan Umum sub aspek Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
- (1) Tenaga Kerja meliputi belum adanya sarana Balai Latihan Kerja (BLK), kurang optimalnya hubungan industrial, pengantar kerja dan instruktur pelatihan ketenagakerjaan, peran lembaga ketenagakerjaan, belum optimalnya *match* antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha, dan kurangnya penempatan angkatan kerja.
 - (2) Pangan yaitu belum optimalnya implementasi keragaman, pengelolaan, dan distribusi pangan dan gizi.
 - (3) Pemberdayaan masyarakat meliputi banyaknya masyarakat yang perlu diberdayakan baik secara kapasitas, ekonomi dan sosial, kurangnya koordinasi dan sinergi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, dan belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan secara langsung .
 - (4) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan BKB.

- (5) Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil meliputi rendahnya jumlah koperasi sehat dan kapasitas pengurus dalam manajemen koperasi, belum optimalnya pembinaan dan pengawasan koperasi, rendahnya kesadaran masyarakat dalam berkoperasi, rendahnya pengembangan jenis koperasi, rendahnya daya saing Usaha Mikro Kecil (UMK), belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan UMK, kurangnya akses permodalan dan pemasaran, rendahnya penggunaan IPTEKUMK, kurangnya dukungan regulasi terhadap UMK dalam kepemilikan legalitas izin usaha, belum optimalnya potensi unggulan, pengembangan sentra dan kluster UMK.
- d. Aspek Pemerintahan Pilihan
- (1) Kelautan dan Perikanan meliputi belum optimalnya hasil produksi dan pengolahan perikanan, dan penggunaan teknologi perikanan dan belum berfungsinya kawasan minapolitan
- (2) Pertanian meliputi infrastruktur pendukung pertanian khususnya penyediaan sumber air/irigasi masih kurang memadai, berkurangnya lahan pertanian produktif akibat perkembangan dan pertumbuhan kota, belum adanya regulasi daerah tentang lahan pertanian berkelanjutan, penggunaan teknologi pertanian yang belum memadai, SDM di sektor pertanian didominasi oleh petani penggarap dan buruh tani, tingginya harga agroinput, masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam hal budidaya dan penganekaragaman produk pengolahan hasil pertanian, produk pertanian kurang berdaya saing dan belum optimalnya diversifikasi pertanian.
- (3) Perdagangan meliputi masih belum refresentatifnya dan terbatasnya jumlah pasar rakyat, rendahnya kesadaran pedagang dalam melakukan tera ulang alat ukur, belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan PKL, pengendalian tata niaga pangan, bahan bakar, dan pasar modern, pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa dan belum tersedianya pusat pemasaran produk unggulan.
- (4) Perindustrian meliputi masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang industri dan kemampuan permodalan para pelaku Industri Kecil Menengah

(IKM), keterbatasannya inovasi dan pemanfaatan teknologi oleh IKM, rendahnya daya saing produk IKM masih rendah, dan belum optimalnya pemanfaatan kawasan peruntukan industri.

e. Aspek Daya Saing Daerah

- (1) Kemampuan Ekonomi Daerah meliputi masih tingginya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita terutama konsumsi bahan makanan dan masih rendahnya daya beli masyarakat.
- (2) Sumber Daya Manusia meliputi rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian, tingginya angka beban ketergantungan (*dependency ratio*), rendahnya rasio wirausahaan (*entrepreneurship*).

Untuk menjamin konsistensi dan sinergi pembangunan spasial maka perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan isu strategis daerah itu sendiri yakni Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dan internasional. Isu strategis adalah hal prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah dengan ciri prioritas, mendasar, mendesak, berdampak waktu menengah dan panjang dan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan berjangka menengah dan panjang. Garis besar isu strategis dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 yaitu:

- a. *Sustainable Development Goal's*
- b. *ASEAN Free Trade Area*
- c. Isu Strategis Nasional (Indonesia) dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dengan visi "*Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong*".
- d. Isu Strategis Provinsi (Jawa Barat) dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dengan visi "*Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua*". Strategi dan

arah kebijakan pendekatan spasial dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor, dan dimensi waktu pembangunan. Kebijakan pengembangan wilayah memberi acuan fokus pengembangan dan arahan sifat pengembangan secara kewilayahan sesuai karakteristik, potensi pengembangan (kebijakan nasional dan infrastruktur strategis eksisting), serta daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan. Kebijakan struktur dan pola ruang menjadi arahan pengembangan sarana, prasarana, dan pengembangan sektor ekonomi dominan dalam skala provinsi. Penyelarasan ini berimplikasi pada kesesuaian arahan pembangunan ekonomi, sosial, dan fisik dengan target lokasi dan prioritas penanganan yang sesuai dengan fokus pengembangan wilayah serta rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selanjutnya dalam penyelarasan prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 diperhatikan pula indikasi program pemanfaatan ruang dalam dimensi waktu yang sama untuk mencapai tujuan penataan ruang Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini Kota Tasikmalaya dimasukkan dalam koridor Wilayah Pengembangan Priangan Timur-Pangandaran. Kota Tasikmalaya diarahkan menjadi pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa.

- e. Isu Strategis Kabupaten/Kota Sekitar
- f. Isu Strategis Kota Tasikmalaya

Berdasarkan runutan uraian diatas maka dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, mengerucut menjadi isu strategis RPJMD. Isu strategis yang berhubungan langsung dengan kemiskinan adalah pada poin 2, 3, 4, dan 5 sebagai berikut:

- a. Poin 2. Penanggulangan kemiskinan. Ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan

dan angka pengangguran serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, dan masih rendahnya TPAK.

- b. Poin 3. Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup. Terutama ditandai dengan masih luasnya permukiman kumuh, banyaknya RTLH, dan belum optimalnya capaian rumah tangga bersanitasi
- c. Poin 4. Pertumbuhan dan pemerataan perekonomian serta daya beli. Terutama ditandai dengan masih rendahnya PDRB per kapita dan daya beli, tingginya kontribusi bahan makanan terhadap laju inflasi, tingginya rasio gini, kurangnya jumlah pelaku wirausaha, kurangnya daya saing dan kemandirian UMK, pemasaran dan permodalan, serta belum memadainya sarana dan prasarana perdagangan.
- d. Poin 5. Kualitas SDM dan pelayanan dasar dititikberatkan pada kualitas hidup masyarakat terkait terutama urusan pendidikan, kesehatan, sosial, dan keterampilan dan keahlian tenaga kerja.

Berdasarkan isu strategis tersebut diatas maka Pemerintah Kota dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, memposisikan penanggulangan kemiskinan secara langsung pada Misi ke-2 dan tidak langsung pada Misi ke3 dan ke-4 yang diringkas dalam tabel berikut.

Tabel 3.
Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan
yang Berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Program
Misi 2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat		
T.3. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat,	S3. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Tasik Bersedekah, Program Gema Madani, Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)
T.4. Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	S4. Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri, perdagangan dan jasa	Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah
	S.5. Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Program Pencetakan Wirausaha Baru, Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas dan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
	S6. Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah	Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
Misi 3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan		
T.5. Tersedianya infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan berkelanjutan	S7. Meningkatnya layanan infrastruktur dasar perkotaan yang aman, nyaman dan inklusif	Program pemantapan infrastruktur dasar perkotaan
	S8. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat	Program Gema Manasik
Misi 4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia		
T.6. Meningkatnya kualitas	S10. Meningkatnya aksesibilitas dan	Program Tasik Cerdas

Tujuan	Sasaran	Program
hidup masyarakat	kualitas pendidikan	
	S11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Tasik Sehat
T.7. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengarusutamaan gender	S14. Meningkatnya keluarga berencana dan pengendalian penduduk	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan uraian diatas tentang kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 dapat disimpulkan bahwa komitmen pemerintah kota dalam penanggulangan sangat baik. Visi RPJMD *"Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani"* mengandung substansi berdimensi vertikal dan horizontal. Religius, mengindikasikan sikap dan perilaku masyarakat yang mempunyai kedalaman iman dan taqwa terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan memperhatikan tata nilai, norma, dan kearifan lokal. Maju, mengindikasikan harapan masyarakat yang sejahtera dengan sikap dan perilaku masyarakat yang adaptif terhadap dinamika zaman. Madani, mengindikasikan sikap dan perilaku masyarakat yang beradab dalam kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

Tanpa mengesampingkan pentingnya program pembangunan lain, hal yang menarik dan sesuai topik penelitian ini adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya mencanangkan Program Tasik Bersedekah. Dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, program ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan dan kepedulian masyarakat Kota Tasikmalaya atas realita sosial ekonomi di Kota Tasikmalaya, terutama tingginya persentase penduduk kemiskinan, sedangkan disisi lain potensi dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqah) sangat besar. Program pembangunan ini kemudian dicanangkan dan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya. Tujuan dari program ini adalah menumbuhkembangkan kesadaran kolektif untuk mengamalkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius menuju Kota Tasikmalaya

yang maju dan madani. Sasaran program pembangunan ini adalah:

- a. terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap zakat, infaq, dan shodaqah,
- b. terjadinya peningkatan penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqah, dan
- c. terjadinya peningkatan mekanisme dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqah.

Arah kebijakan pelaksanaan Program Tasik Bersedekah adalah:

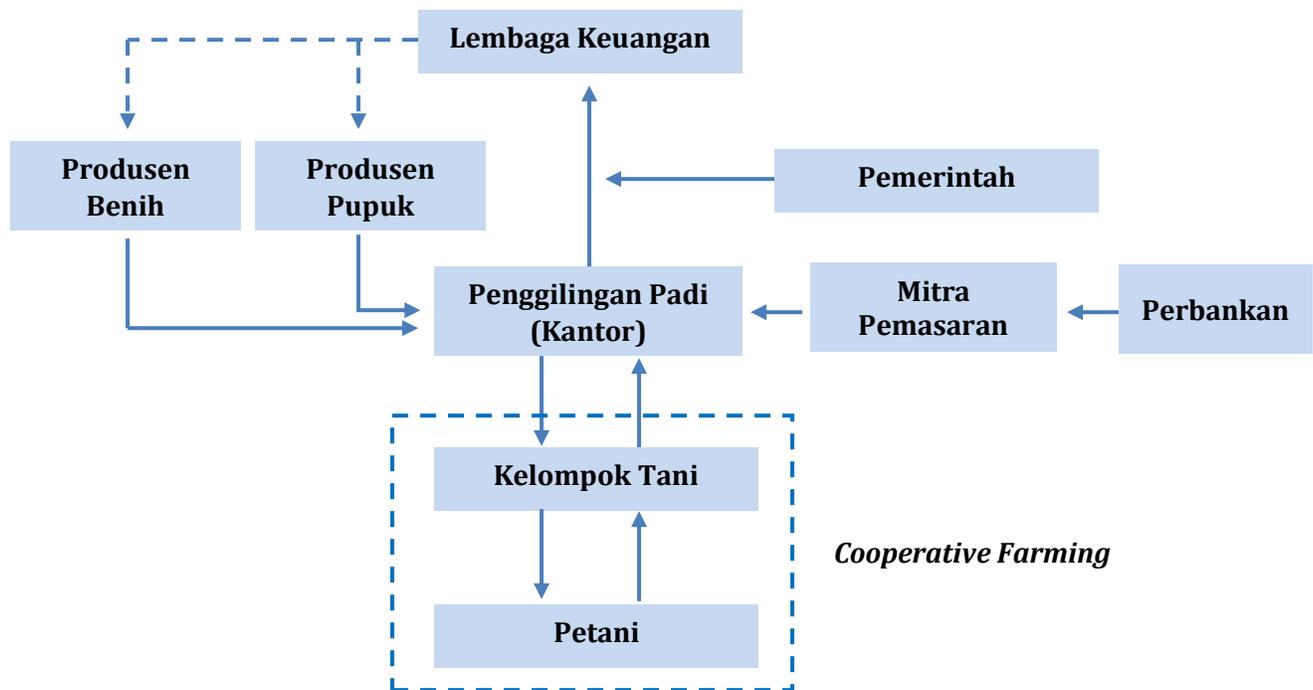
- a. peningkatan komitmen dukungan program dari seluruh pemangku kepentingan melalui sosialisasi,
- b. peningkatan tata kelola dan mekanisme penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqah dengan melibatkan lembaga pengelola dana zakat, infaq, dan shodaqah dan UPZ pada tingkat kelurahan dan SKPD, dan
- c. pemanfaatan dana untuk membantu mengatasi masalah sosial terutama penanggulangan kemiskinan dalam kerangka *empowerment*.

D. Manajemen Zakat Produktif sebagai Solusi

Misi 2 RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 salah satunya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan sasaran meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat yang salah satunya melalui program pembangunan daerah yaitu Program Tasik Bersedekah. Simpulan atas analisis pada bagian deskripsi dan eksplanasi kemiskinan di Kota Tasikmalaya dalam kerangka teori lingkaran setan kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya terdapat pada masyarakat petani miskin. Hal ini dapat dijadikan titik awal penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya dan dapat dilaksanakan dengan program pembangunan daerah yaitu Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK). P3KK sendiri salah satunya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Sektor Pertanian Program Penanggulangan Kemiskinan Sektor Perikanan. Pada intinya P3KK adalah upaya Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam bentuk pelaksanaan pertanian perkotaan. P3KK dan Program Tasik Bersedekah merupakan program yang berjodoh dimana didalamnya peran masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan sangat signifikan keterlibatannya. P3KK

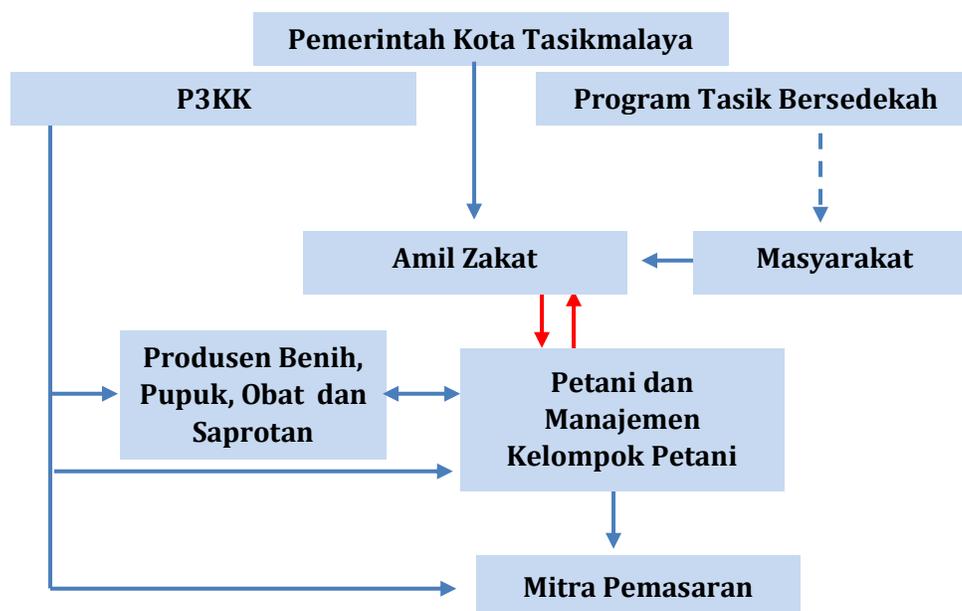
memposisikan pemerintah dalam peran paling signifikan, sedangkan Program Tasik Bersedekah memposisikan masyarakat dalam peran paling signifikan.

Kemudian bagaimana kegiatan teknis agar kedua program ini dapat terlaksana secara nyata? Model *Cooperative Farming* yang diintegrasikan dengan manajemen zakat produktif dalam Program Tasik bersedekah dapat dijadikan pilihan solusi penanggulangan petani miskin. Sederhananya, peran serta masyarakat melalui zakat dan instrument filantropi Islam lainnya terlibat dalam *cooperative farming*. Berikut merupakan mekanisme *Cooperative Farming* yang diadopsi dari Nuryanti (2005).



Gambar 17.
Mekanisme *Cooperative Farming* Memberdayakan Petani

Mekanisme pada gambar 17 diatas dimodifikasi untuk mewadahi program P3KK dan Program Tasik Bersedekah.



Gambar 18.
Modifikasi Mekanisme *Cooperative Farming* Memberdayakan Petani Miskin

Peranan masing-masing pihak yang terlibat dalam *Cooperative Farming* di Kota Tasikmalaya dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Pertanian dan Perikanan, Sekretariat Daerah, dan SKPD lainnya berperan sebagai fasilitator dan katalisator dalam hal manajemen strategik pertanian. Pemerintah harus membuat sebuah cetak biru dalam berbagai hal sesuai kewenangannya. Pertama, suksesi Program Tasik Bersedekah dengan menggandeng berbagai lembaga yang tentu saja amil zakat seperti BAZNAS sebagai lembaga utama dana mil zakat lain untuk dilibatkan dalam kerjasama *cooperative farming*. Kedua, suksesi P3KK dengan cara pengkondisian produsen benih, obat, pupuk, dan sarana produksi pertanian, pemberian bantuan peralatan dan peyuluhan sistem pertanian yang efektif, efisien, dan lebih produktif kepada kelompok tani,

- pemberian bantuan teknologi pengolahan hasil pertanian kepada kelompok tani, dan pengembangan jejaring pemasaran hasil pertanian selain BULOG.
2. Masyarakat menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf kepada amil zakat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dana yang terkumpul di amil zakat selanjutnya dikelola sedemikian rupa agar memadai dan memenuhi prinsip *prudent* untuk pembiayaan *cooperative farming*. Skema pembiayaan yang digunakan adalah *Qardhul Hasanyaitu* suatu jenis pembiayaan syari'ah tanpa imbalan seperti margin bagi hasil dimana petani dapat menggunakan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu sehingga dalam pengembaliannya pada akhir periode pembiayaan petani membayar dalam jumlah yang sama. *Qardhul Hasan* merupakan solusi pembiayaan kepada petani miskin yang apabila ditinjau dari kriteria kelayakan pembiayaan atau kredit lembaga keuangan komersial tidak layak. Petani yang dimaksud disini adalah petani kurang mampu (*dhuafa*) dan termasuk ke dalam *mustahik* sebagai modal untuk usaha pertanian dengan jumlah pembiayaan yang disesuaikan dengan kapasitas usaha petani dan kemampuan keuangan dana zakat produktif. Pembatasan jumlah dan jangka waktu sangat penting sebagai proses *revolving* sehingga dana dapat digulirkan kembali kepada *mustahik* lainnya. Prinsip kehati-hatian atau *prudent* merupakan prinsip yang menyatakan amil zakat dalam menjalankan fungsinya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya yang disalurkan kepada petani dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan investasi. Prinsip *prudent* merupakan mitigasi risiko melalui penerapan ketentuan-ketentuan secara konsisten dan komprehensif yang ditandai dengan adanya sistem pengawasan internal dan sistem pengendalian manajemen.
 3. Produsen menyediakan benih, obat, pupuk dan sarana produksi pertanian sesuai spesifikasi yang dibutuhkan petani dalam kualitas dan kuantitas yang mencukupi. Spesifikasi tersebut didapatkan oleh produsen atas informasi yang diberikan oleh pemerintah sesuai komoditas pertanian apa yang akan diusahakan.
 4. Petani dalam Kelompok Tani. Petani yang bergerak dalam pertanian komoditas

sama membentuk kelompok tani yang berfungsi sebagai manajemen petani. Kelompok tani berfungsi sebagai pengumpul hasil pertanian primer (*on farm*) dan mengadakan pengolahan hasil pertanian primer agar memberikan nilai tambah ekonomi yaitu produk sekunder (*off farm*).

5. Mitra pemasaran. Selain BULOG, mitra pemasaran swasta yang telah diajak bekerjasama menerima produk hasil pertanian sesuai dengan kuantitas, kontinuitas, dan standar mutu yang disepakati.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data statistik kemiskinan di Kota Tasikmalaya dan sandingan dengan teori lingkaran setan kemiskinan Nurkse, maka disimpulkan bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya titik awalnya adalah status pekerjaan penduduk miskin berada disektor pertanian dan sebagian besar berstatus informal. Manajemen zakat produktif dapat dijadikan solusi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya melalui mekanisme *cooperative farming* dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui zakat dan instrumen filantropi Islam lainnya yaitu infaq, sedekah, dan wakaf. Dana yang terkumpul di amil zakat disalurkan kepada *mustahik* melalui skema *Qardhul Hasan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2012). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten-Kota Tahun 2011 (Nomor Publikasi :04340.1203). Jakarta. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2013). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten-Kota Tahun 2012 (Nomor Publikasi :04340.1302). Jakarta. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2014). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten-Kota Tahun 2013 (Nomor Publikasi : 04340.1402). Jakarta. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten-Kota Tahun 2014 (Nomor Publikasi : 04340.1601). Jakarta. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten-Kota Tahun 2015 (Nomor Publikasi : 04340.1603). Jakarta. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten-Kota Tahun 2016 (Nomor Publikasi : 04340.1701). Jakarta. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.

- Badan Pusat Statistik. (2018). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten-Kota Tahun 2017(Nomor Publikasi :04340.1801). Jakarta. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten-Kota Tahun 2018(Nomor Publikasi :04340.1901). Kota Tasikmalaya. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya. (2019). Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Menurut Lapangan Usaha 2014-2018.(Nomor Publikasi : 32780.1901). Kota Tasikmalaya. Diakses dari <https://www.tasikmalayakota.bps.go.id>.
- Djannata, Andika Azzi dan Atmanti, Hastarini Dwi. (2011). *Analisis Program-Program Penanggulangan Kemiskinan menurut SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Semarang dengan Metode Analisis Hierarki Proses (AHP)*. Tersedia dari Diponegoro University Institutional Repository. ID Code 32818.
- Gubernur Jawa Barat. (2017) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017). Bandung. Diakses dari <http://bappeda.jabarprov.go.id>.
- Ilmi, Syaiful. (2017). Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam. Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syari'ah, Volume 13, Nomor 1, e-ISSN 2502-8367. Halaman 67-84. DOI: <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.918>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2009). Undang-undang tentang Kesehatan (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009). Jakarta. Diakses dari <http://www.jdih.kemenu.go.id>.
- Nazara, Suahasil. (2010). Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi.Jakarta. Kantor Perburuhan Internasional. Diakses dari <https://www.ilo.org>.
- Nuryanti, Sri. (2005, 29 Juni – 5 juli). “ Model *Cooperative Farming* ” untuk Peningkatan Pendapatan Petani. Tabloid Sinar Tani. Diakses dari <http://old.litbang.pertanian.go.id>.
- Presiden Republik Indonesia. (2015). Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015). Jakarta. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Rizal, Rofiq Nur. (2006). Apakah Jenjang Pendidikan Dasar Tenaga Kerja Berperan dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia?. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Volume 16 Nomor 1, e-ISSN 2406-9280. Halaman 15-30. DOI: <http://dx.doi.org/10.21002/jepi.v16i1.596>.
- Satrio, Indra. (2018). Sektor Pertanian: Faktor Utama Penentu Kemiskinan Jawa Barat. Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Agriekonomika Volume 7, Nomor 2. Halaman 188-196. DOI: <http://doi.org/10.21107/agriekonomika.v7i2.4707>.
- Walikota Tasikmalaya. (2018). Peraturan Daerah Kota Tasikmalayatentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Peraturan Daerah Nomor5 Tahun 2018). Tasikmalaya. Diakses dari <https://jdih.tasikmalayakota.go.id>.

